

Memorabilia
**MEREKA PEDULI
BANK INDONESIA**



1001
PEMIKIRAN
AKADEMISI

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA.....	iv
SEKAPUR SIRIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAGIAN I. RELAKSASI SUKU BUNGA ACUAN.....	1
BAB I. MENUJU SUKU BUNGA RENDAH.....	1
Sinyal Akomodatif Kebijakan BI 2020 ; Haryo Kuncoro.....	2
Tahun 2020, Berharap Era Suku Bunga Rendah ; Agus Herta Sumarto.....	5
Virus Corona Tak Mempengaruhi Optimisme RDG Januari 2020 ; Ana Sriekaningsih.....	8
Mengawal Kebijakan Awal Tahun Bank Indonesia ; Haryo Kuncoro.....	12
Hilangnya Momentum Efek Januari ; Haryo Kuncoro.....	15
Relaksasi Suku Bunga Acuan BI: Dunia Usaha Bergeming! ; Frits O. Fanggidae.....	17
Suku Bunga Acuan Melawan Covid-19 ; Suparmono.....	19
Memaknai (Lagi) Pemangkasan BI 7-DRRR ; Haryo Kuncoro.....	21
RDG Februari Antisipasi Covid-19 ; Ana Sriekaningsih.....	24
Korona, Suku Bunga Acuan, dan Nilai Tukar ; Haryo Kuncoro.....	28
Stimulus Perbankan lewat Suku Bunga Acuan ; Y. Sri Susilo.....	31
Formula Moneter dalam Peperangan Melawan Covid-19 ; Wendy.....	33
Transmisi Kebijakan BI ke Dalam Rezim Sektor Riil di Daerah ; Frits O. Fanggidae.....	37
"Nasib" Bunga Acuan di Era New Normal ; Haryo Kuncoro.....	39
Tantangan Bunga Acuan Pasca-Burden Sharing ; Haryo Kuncoro.....	42
Suku Bunga Acuan dan Lazy Bank ; Haryo Kuncoro.....	45
Ketika Bunga Acuan Dihadang Resesi ; Haryo Kuncoro.....	47
Suku Bunga dan Resesi ; Suparmono.....	50
Efektifkah Penurunan Suku Bunga? ; Nugroho SBM.....	53
Menanti Efek Anti Resesi Bunga Acuan BI ; Haryo Kuncoro.....	56
Menuju Suku Bunga Ideal ; Imron Rosyadi.....	59
Menuju Bunga Rendah ; Teguh Santoso.....	61
Mengharap Efek Penurunan BI Repo Rate dan LPS Rate ; Haryo Kuncoro.....	64
Suku Bunga Acuan Dipangkas, Suku Bunga Kredit Kapan? ; Imron Rosyadi.....	67
Mengukur Efektivitas Kebijakan BI ; Agus Herta Sumarto.....	70
BAB II. INTERVENSI DEMI RUPIAH.....	73
"Intervensi", Jurus Bank Indonesia Meredam Gejolak Rupiah ; Abdulloh Mubarak.....	74
Antisipasi Peningkatan Volatilitas Kurs Rupiah ; Mohamad Ahlis Djirimu.....	76

Digitalisasi UMKM ; Bagong Suyanto.....	266
Pemulihan Ekonomi Lokal Melalui Transformasi UMKM Digital ; Reniati.....	269
Hambatan dan Solusi Digitalisasi UMKM ; Nugroho SBM.....	272
Kebangkitan Ekonomi UMKM ; Haryo Kuncoro.....	275
BI dan Kemandirian Ekonomi Pesantren ; Abdulloh Mubarak.....	278
Mengukuhkan Ekosistem Halal ; Mansur Afifi.....	281
UMKM Sahabat Milenial ; D. Wahyu Ariani.....	284
Bank Indonesia dan Perlindungan Konsumen ; D. Wahyu Ariani.....	286
Sertifikasi Halal Produk UMKM ; Abdulloh Mubarak.....	288
UMKM dan Program Si Bakul Jogja ; Bagong Suyanto.....	290
BAGIAN III. DIGITALISASI HARGA MATI.....	293
BAB I. ERA SMARTPHONE.....	293
Risiko Digitalisasi Keuangan ; Bagong Suyanto.....	294
Digitalisasi dan Literasi Keuangan ; Bagong Suyanto.....	297
Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Potensi Ketimpangan ; Frits O. Fanggihdae.....	300
BI Jaga Kedaulatan Sistem Pembayaran ; Arif Jauhar Tontowi.....	302
Digitalisasi Sistem Pembayaran: Keseimbangan Konsumsi dan Produksi ; Frits O. Fanggihdae.....	306
Integrasi Ekonomi dan Energi Digitalisasi di Indonesia ; Mohamad Ahlis Djirimu.....	308
Peluang dan Tantangan Pembayaran ; Wahyu Ario Pratomo.....	311
Menuju Sistem Pembayaran Digital ; Suparmono.....	314
Dilema Regulasi di Era Digitalisasi ; Margiyono.....	317
BI Mendobrak Integrasi Sistem Pembayaran Digital ; Wendy.....	319
Inovasi Digital Membuka Akses Populasi <i>Unbanked</i> ; Ana Sriekaningsih.....	322
Sistem Pembayaran Indonesia yang Inklusif, Integratif dan Protektif ; Margiyono.....	326
Digitalisasi dan Daya Saing Perbankan Syariah ; Mukhamad Najib.....	329
Uang Elektronik Indonesia ; Mohamad Ahlis Djirimu.....	332
Kesiapan Pelaku Bisnis Menggunakan Sistem Pembayaran Digital ; Reniati.....	334
Risiko dan Manfaat Digitalisasi Keuangan ; Bagong Suyanto.....	337
Membangun Ekosistem Pembayaran Digital ; Haryo Kuncoro.....	340
Ekonomi Digital dan Respons Bank Indonesia ; Adhitya Wardhono.....	343
Pembayaran Non tunai Momentum Melawan Covid-19 ; Wahyu Ario Pratomo.....	346
Transaksi Nontunai di Tengah Covid-19 ; Ana Sriekaningsih.....	350
Transaksi Non-Tunai di Tengah Covid-19 ; Suparmono.....	353
"New (Norm) AL" Sistem Pembayaran ; Margiyono.....	355
Pandemi Covid-19 dan Bank Indonesia ; Y. Sri Susilo.....	358
BAB II. BERDAULAT DENGAN UANG DIGITAL.....	361
QRIS ; Y. Sri Susilo.....	362
Selamat Datang Wechat Pay ; Y. Sri Susilo.....	364

BI dan Kemandirian Ekonomi Pesantren

Abdulloh Mubarok

Ada sekitar 28.194 pondok pesantren dengan lebih dari 4 juta santri tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pesantren tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan menjalankan tiga fungsi, yakni sebagai lembaga pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah melakukan *transfer of knowledge* seperti halnya pendidikan formal lainnya. Sebagai lembaga keagamaan, pesantren telah melakukan pembentukan karakter dan kepribadian unggul. Sementara, sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat, pesantren telah melakukan pemberdayaan yang berorientasi pada kesejahteraan pesantren dan lingkungannya.

Meskipun demikian, dari ketiga fungsi tersebut, masyarakat lebih mengenal pesantren sebagai lembaga keagamaan. Fungsi pesantren yang terakhir belum optimal dan tidak begitu banyak diketahui masyarakat. Padahal, pesantren memiliki keunikan yang berpotensi menciptakan kemandirian ekonomi. Keunikan tersebut seperti adanya sumberdaya manusia (SDM) dengan jumlah dan ikatan komunitas yang kuat. Keberadaan SDM ini dapat menjadi sumber permintaan dan produsen dalam berbagai kegiatan ekonomi. Keunikan lainnya terkait sumberdaya santri. Santri terbukti memiliki semangat kerja ulet dan daya juang yang tinggi. Keunikan ini berpotensi menjadi motor

penggerak ekonomi, lebih-lebih jika dipadu dengan kemampuan kewirausahaan. Mereka akan mampu melakukan kreativitas dan inovasi usaha baik terkait, bahan, teknik, produk jadi (jasa), ataupun pemasaran.

Keunikan tersebut kemudian menarik beberapa pihak untuk peduli memperdayakan ekonomi pesantren. Pihak-pihak tersebut antara lain Kementerian Agama, Kemenko Perekonomian, dan Bank Indonesia (BI). Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam, misalnya, telah menyusun *roadmap* pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Kementerian ini telah menyusun dua kebijakan pemberdayaan ekonomi pesantren. Pertama, bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian, mengembangkan kawasan industri melalui penyiapan tenaga kerja terampil lulusan pondok pesantren, sinkronisasi kawasan industri dan kawasan religius. Kedua, bersama Bank Indonesia, mengembangkan kerja sama kemitraan dalam pemberdayaan ekonomi pesantren sekaligus penguatan ekonomi syariah. Kemenko Perekonomian, melalui Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan, telah melakukan implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) se-

bagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 82/2016

Sementara BI, di samping berkolaborasi dengan dua kementerian di atas, juga memiliki program sendiri yang dikenal dengan "Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren". Program BI ini merupakan wujud dari salah satu pilar strategi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain*). Ada tiga program yang sedang dijalankan. Pertama, pengembangan berbagai unit usaha berpotensi yang memanfaatkan kerja sama antar pesantren. Kedua, mendorong terjalannya kerja sama bisnis antar pesantren melalui penyediaan *virtual market* produk usaha pesantren sekaligus *business matching*. Ketiga, pengembangan *holding* pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan pesantren.

Sampai mana program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren berjalan? Terkait program pertama, BI telah merealisasikan dengan membantu mengembangkan berbagai unit usaha. Sampai tahun 2019, BI sudah membangun lebih dari sampai 250 unit usaha pesantren, dimana 210 di antaranya diikuti dalam program replikasi bisnis untuk pesantren baru. Sektor usaha program replikasi tersebut bervariasi mulai dari air minum kemasan, daur ulang sampah, jasa, minimarket, perikanan, pertanian, peternakan, pengolahan kelapa, dan sektor lainnya.

Untuk program kedua, BI telah merealisasikan melalui *business matching*, yaitu kegiatan mengintegrasikan satu bisnis dengan bisnis lainnya. *Business matching* biasanya diselenggarakan di sela-sela kegiatan BI yang bernama Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF merupakan kegiatan puncak dari kegiatan ekonomi dan keuangan syariah ber-

